

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 10 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Ghofir (2002:12) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sunarto (2005:15) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, kemudian disusul oleh pendapatan dari retribusi daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Penerimaan pajak ini digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suparmoko, 2002:55).

Menurut Sunarto (2005:15) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah dibagi menjadi dua yakni pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak rokok
5. Pajak air permukaan

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota:

1. Pajak air tanah
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan
3. Pajak hiburan
4. Pajak sarang burung Wallow
5. Pajak reklame
6. Pajak parkir
7. Pajak penerangan jalan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.1 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ada beberapa perbedaan antara pajak pusat dengan pajak daerah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilandaskan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi, untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap “menempatkan” pada fungsinya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi finansial (*Fungsi Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Fungsi Regulate*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Resmi:2005) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila ada suatu peristiwa, kegiatan, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang di pungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2015) dalam pemungutan pajak dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System* / Sistem Penilaian Resmi

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System* / Sistem Penilaian Diri

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung kepada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System* / Dengan Memegang Sistem

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Petunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006), Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya.

Menurut Joko Untoro (2010:39) Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* rill.

Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian membaik atau malah sebaliknya. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) dan daerah asal produksi (regional).

Adapun pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat mempengaruhi hal-hal berikut:

1. Tingkat kesejahteraan
2. Kesempatan kerja

3. Distribusi pendapatan yang merata

2.1.2.1 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Berdasarkan konsep mikro dalam teori produksi, jumlah *output* sangat ditentukan oleh *input-input* yang terlibat dalam proses produksi.

Faktor-faktor yang menunjang perekonomian suatu negara yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan terampil.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut, serta jumlah dan hasil kekayaan tambang.

3. Sumber Daya Modal

Negara yang tumbuh pesat cenderung melakukan investasi sangat besar dalam pembentukan barang modal baru. Upaya berinvestasi bertujuan untuk meningkatkan *social overhead capital* seperti membangun jalan, irigasi, sarana dan prasarana lainnya.

4. Teknologi Dan Inovasi

Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek yang utama adalah:

- a. Dapat mempertinggi efisiensi dalam kegiatan produksi.
- b. Menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah di produksi sebelumnya.
- c. Meningkatkan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga.

Disamping itu ada juga faktor lain yang turut berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Fenomena pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak jaman dahulu kala sehingga banyak para ahli yang telah merumuskan teori-teori mengenai hal tersebut, seiring berubahnya zaman teori-teori tersebut juga ikut berubah. Teori-teori tersebut mulai dari hasil pemikiran kuno lama-kelamaan menjadi modern.

Para ahli ekonomi yang telah mengemukakan mengenai teori pertumbuhan klasik adalah Adam Smith dan David Ricardo dengan T.R Malthus. Teori yang dikemukakan Adam Smith berbeda dengan dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dan T.R Malthus. Adam Smith mengungkapkan bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi pertumbuhan pada perekonomian pula. Disisi lain, David Ricardo dan T.R Malthus mengemukakan bahwa jika pertumbuhan penduduk terjadi secara berlebihan, maka upah dan bahan makanan tidak

akan mencukupi kebutuhan mereka sehingga perekonomian akan statis atau mengalami stagnasi.

1. Teori inovasi Schumpeter.

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai moto penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik dinamika persaingan akan mendorong ini.

2. Teori investasi Harrod-Domar

Harrod-Domar dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi.

3. Teori penawaran Martin Feldstein

Menurutnya pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari sisi penawaran (*aggregate supply*). Konsep pertumbuhan ekonomi ini didasarkan pada pandangan ekonomi klasik yang menyatakan *output* lebih memberikan reaksi terhadap insentif pajak dan faktor-faktor pendapatan setelah pajak, dibandingkan dengan perubahan dalam permintaan *aggregate*.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Menurut Said (2012) adalah jumlah orang bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Penduduk dapat diartikan sebagai seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyak orang yang menempati suatu daerah

atau negara akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk biasanya diukur dengan jumlah penduduk perkilometer persegi.

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan umur berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Reverend Thomas Malthus (Arsyad, 2004) dalam teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi yang dalam tulisannya yang berjudul *The Principle of Population*, ia melukiskan konsep yang menurun. Malthus juga menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu disaat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan yang hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa diimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan cepat maka pendapatan perkapita akan turun dan cenderung akan rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu

pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap penawaran bahan pangan, tetapi juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, sumber daya manusia. Menurut (Kuncoro, 2010) terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa semakin tinggi. Rendahnya sumber daya akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang nantinya akan membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara yang penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian, pertumbuhan penduduk akan mengancam keseimbangan antara sumber daya alam langka dan penduduk, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktivitasnya ke sektor yang produktivitasnya lebih maksimal dalam hal ini modern.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan membuat semakin sulit untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial.

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Secara umum ada tiga faktor utama demografi yang mempengaruhi jumlah penduduk (Said Rusli, 2012). Diantaranya sebagai berikut:

1. Kelahiran

Kelahiran atau *fertilitas* adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup. Didalam kelahiran terdapat beberapa konsep diantaranya: Lahir hidup, Lahir mati, *Abortus*.

2. Kematian

Kematian atau *mortalitas* adalah ukuran jumlah kematian karena akibat yang spesifik pada satu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per-1000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun.

3. Perpindahan

Perpindahan atau *migrasi* adalah proses perpindahan organisme dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam beberapa kasus organisme berpindah untuk mendapatkan cadangan makanan untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena kelebihan populasi.

Jumlah penduduk mempunyai dua peranan dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai permintaan dan penawaran. Dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen, sedangkan dari segi permintaan

penduduk bertindak sebagai konsumen. Oleh karena itu perkembangan jumlah penduduk yang tinggi tidak selalu merupakan penghambat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi apabila peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tersebut dibarengi dengan kualitas dan kapasitas dari setiap penduduk untuk mengelola setiap produksi dengan optimal. Hal ini mempunyai arti penting bahwa peningkatan jumlah penduduk tinggi akan dibarengi dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Dilain sisi penduduk dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya sebagai beban bagi pembangunan ekonomi. Selain itu jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan akan menimbulkan masalah ketenaga kerjaan yaitu pengangguran.

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi, karena apabila jumlah penduduk tinggi dan tingkat produktivitas yang optimal maka akan menimbulkan efek yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Sehingga pada akhirnya pendapatan penduduk akan bertambah, dan dengan demikian akan menambah pendapatan daerah melalui pajak daerah.

2.1.4 Inflasi

Menurut Winardi (1995) pengertian inflasi adalah kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan jumlah barang-

barang atau jasa yang ditawarkan atau karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terhadap gejala yang meluas.

Menurut (William N,2000) inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat, atau kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan penyakit ekonomi dimana naiknya harga-harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan nilai uang suatu negara menurun.

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, rumus menghitung inflasi:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

INF_n : Inflasi atau deplasi pada waktu (bulan/tahun) (n)

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

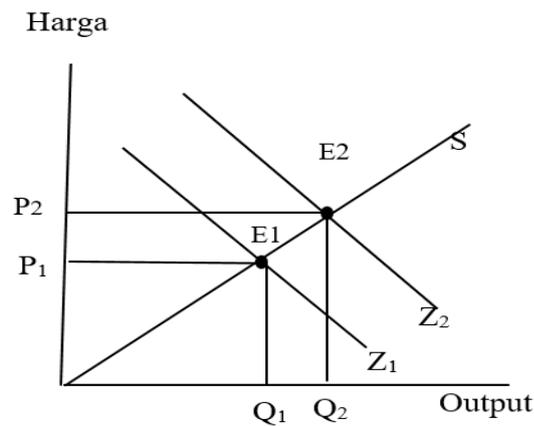
2.1.4.1 Jenis-Jenis Inflasi

Ada beberapa jenis cara untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita berikut adalah jenis-jenis inflasi:

1. Inflasi berdasarkan “parah” tidaknya inflasi.
 - a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
 - b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
 - c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
 - d. Hiper inflasi (di atas 100% setahun)

Sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah atau tidaknya inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa saja yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Jika seandainya laju inflasi 20% dan semuanya berasal dari kenaikan harga barang yang dibeli oleh masyarakat golongan berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita menamakan inflasi yang parah.

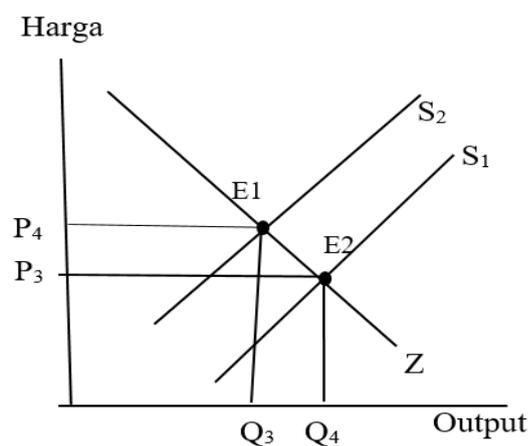
2. Inflasi menurut penyebabnya
 - a. *demand inflation* atau inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang yang terlalu kuat (misalnya, karena meningkatnya permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, dan lain-lain)
 - b. *Cost full inflation* atau inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, tingkat upah)



Gambar 2.1 Demand Pull Inflation

Sumber: *Ekonomi Makro Edisi 4, Boediono.*

Gambar 2.1 menggambarkan suatu *demand full inflation*, karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, maka kurva *aggregate demand* bergeser dari Z_1 ke Z_2). Akibatnya, tingkat harga umum naik pada P_1 ke P_2 .



Gambar 2.2 Cost Push Inflation

Sumber: *Ekonomi Makro Edisi 4, Boediono.*

Pada gambar 2.2 kita lihat bahwa bila biaya produksi naik (misal, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri,

atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, tingkat upah) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S1 ke S2.

Kedua jenis inflasi ini jarang dijumpai dalam praktek dalam bentuknya yang murni. Pada umumnya inflasi yang terjadi adalah kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut, dan sering kali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

3. Inflasi berdasarkan asal dari inflasi

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri bisa timbul karena beberapa faktor misalnya karena defisit anggaran yang diakibatkan oleh gagalnya panen yang menyebabkan langkanya hasil panen seperti sayuran, beras sehingga harganya menjadi mahal, dan sebagainya.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga (inflasi) dari luar negeri atau di negar-negara langganan berdagang kita.

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun seberapa jauh penularan inflasi juga tergantung kepada kebijakan pemerintah yang diambil. Dengan kebijakan-kebijakan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

2.1.4.2 Teori Inflasi

Menurut Boediono (1990). Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi, diantaranya:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar, dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar. Bila jumlah uang beredar tidak ditambah maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun penyebab dari kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

3. Teori Struktural

Adalah teori yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian Negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini disebut dengan teori inflasi “jangka panjang”. Dengan kata lain yang dicari disini adalah faktor-faktor jangka panjang yang dapat mengakibatkan inflasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai penerimaan pajak daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Eri Shiska dan Abu Nizaruddin/ Pengaruh pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Penduduk • Inflasi • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	Secara parsial menunjukan hasil bahwa pertumbuhan penduduk, PDRB, ekonomi, dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan

	Kota Pangkal Pinang tahun 2005-2009/ (Journal of Accounting Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, 2018)			terhadap penerimaan pajak daerah.
2	Rahmad Husein, Herawati dan Dandes Rifa/ Pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Padang/ (Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak • Wajib Pajak 	Secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi dengan penerimaan Pajak Penghasilan, Jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan dan Pemeriksaan Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan.
3	Drian Triastuti dan Dudi Pratomo/ Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/ modal, dan tingkat inflasi terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pembangunan/ Modal 	Secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Pembangunan/

	penerimaan pajak daerah (studi pada pemerintahan daerah Kota Bandung periode 2007-2014)/ (e-Proceeding of Management : Vol.3, No.1 April 2016 Page 320)			modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
4	Phany Ineke Putri/ Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak/ (Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Perkapita • Jumlah SIUP 	Secara parsial pendapatan per kapita dan jumlah surat izin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.
5	Dian Purnama Sari/ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Perkapita 	pendapatan per kapita (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi

	daerah di Provinsi Bengkulu/ (Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 6, No.1, Februari 2016 Hal. 75-84)			Bengkulu, jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu.
6	Denny George Lumy, Paulus Kindangen dan Daisy S.M Engka/ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara/ (Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.6. 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara.
7	Encep Herdiana Rachmat Nalendra/	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	Produk Domestik Regional Bruto

	Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak (survei pada Provinsi Jawa Barat periode 2008-2012)/ (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia)			(PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pusat, inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak.
8	Mispiyanti dan Ika Neni/Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purwokerto/ (SNAPER-EBIS STIE Putra Bangsa tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Nilai Kurs • Tenaga Kerja 	Secara Parsial: PDRB berpengaruh Positif sedangkan Inflasi tidak. Secara Simultan PDRB dan Inflasi berpengaruh Positif terhadap penerimaan pajak daerah.
9	Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita dan Ibnu Muttaqin/ Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestic Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, Produk Domestik Regional Bruto

	Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah/ (Permana Vol. IX No. 2 Pebruari 2018)			berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
10	Tristianto, Anton Arisman dan Icha Fajriana/ Pengaruh Jumlah Industri, PDRB, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang/ (Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang tahun 2013)	•	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Industri • PDRB • Pendapatan Perkapita 	Jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Sedangkan PDRB dan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak Menurut Nurcholis Hanif (2005:177) Jika Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Hal ini meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat. Dalam penelitian Ari Dwi Wulandari (2009) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan terhadap Penerimaan Pajak. Dan penelitian Rahman Kadir (2013) menyebutkan bahwa Belanja Modal berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

2.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak

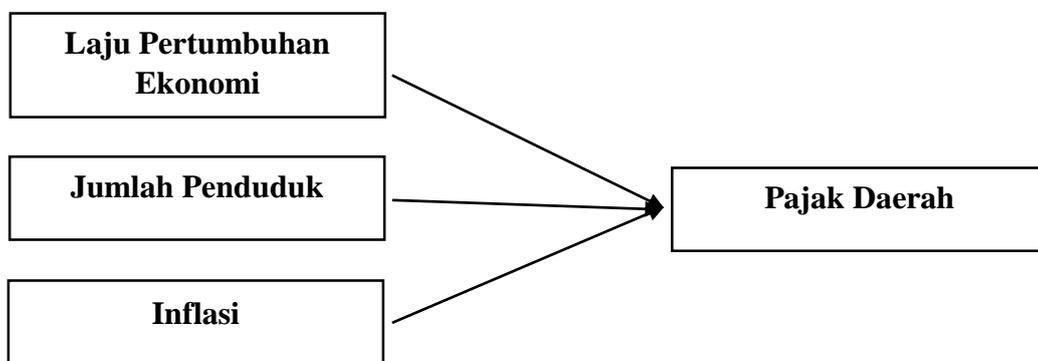
Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) menjelaskan bahwa dengan didukung bukti empiris, jumlah penduduk yang tinggi akan menambah dan menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu mengatakan, penambahan jumlah penduduk yang tinggi dibarengi dengan perubahan teknologi yang tinggi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Pertambahan jumlah penduduk merupakan hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka penerimaan pajak yang dapat ditarik juga akan meningkat.

2.3.3 Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Hubungan Inflasi dengan Penerimaan pajak berbanding terbalik. Terdapat perbedaan antara pengetahuan ekonomi sisi permintaan dengan sisi ekonomi penawaran antara inflasi dengan pajak. Apabila terjadi

kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat akan mengalami perubahan, yang berdampak pada penerimaan pajak (Rosyidi, 2002:119). Dalam penelitian Encep Herdiana (2013) menyatakan tingkat inflasi berhubungan negatif terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian Sherley Angelia (2014) menjelaskan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan studi pustaka yang telah dikemukakan, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan inflasi. Untuk membantu mempermudah dalam pembacaan kerangka pemikiran teoritis secara skema kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya.
2. Diduga secara bersama-sama laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya.